



Pemetaan Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan: Sebuah Scoping Review

Nursaptini,^{1,2*} Entoh Tohani²

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Mataram, Indonesia

²Program Studi PJJ Ilmu Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri
Yogyakarta, Indonesia

Email: nursaptini@unram.ac.id, entoh_tohani@uny.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 30-03-2026, Revised: 03-06-2026, Accepted: 05-06-2026, Published: 30-06-2026

Abstrak

Pemerataan akses dan mutu pendidikan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian berbagai negara. Beragam penelitian telah membahas kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, namun temuan yang tersedia masih tersebar dan belum memberikan gambaran yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan memetakan strategi kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan, mengidentifikasi tema utama penelitian, menganalisis hubungan konseptual antar tema, serta mengungkap implikasinya bagi pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial. Penelitian menggunakan metode scoping review terhadap artikel yang terindeks Scopus. Proses seleksi menghasilkan 18 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Data dianalisis melalui sintesis tematik dan diperkuat dengan analisis bibliometrik menggunakan co-occurrence network dan thematic map. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, transformasi digital, reformasi tata kelola pendidikan, dan pendidikan inklusif. Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa tema education, access, quality, equity, dan policy membentuk struktur konseptual utama dalam literatur. Thematic map mengidentifikasi education dan access sebagai motor themes, sedangkan reforms dan policy berperan sebagai basic themes. Tema yang berkaitan dengan sistem pendidikan, sektor publik, dan inklusivitas masih tergolong emerging themes. Hasil penelitian juga menemukan bahwa pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial memerlukan keterpaduan antara kebijakan pendidikan (policy), pengembangan kurikulum (curriculum), dan penguatan sumber daya pendidikan (educational resources) untuk mendukung literasi sosial dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerataan akses dan mutu pendidikan memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, reformasi kebijakan, transformasi digital, serta penguatan prinsip inklusivitas untuk mewujudkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

akses pendidikan; kebijakan pendidikan; mutu pendidikan; pemerataan pendidikan;
pendidikan ilmu sosial

Abstract

Educational equity in access and quality remains a strategic issue that has attracted the attention of governments and policymakers worldwide. Numerous studies have examined educational policies aimed at promoting educational equity; however, the existing findings remain fragmented and have yet to provide a comprehensive understanding of the strategies employed. This study aims to map educational policy strategies for improving equitable access to and quality of education, identify major research themes, analyze conceptual

relationships among these themes, and explore their implications for the development of Social Studies Education. The study employed a scoping review method of articles indexed in Scopus. The selection process resulted in 18 articles that met the inclusion criteria. Data were analyzed through thematic synthesis and strengthened by bibliometric analysis using co-occurrence network and thematic map techniques. The findings reveal that educational policy strategies can be categorized into five major dimensions: expanding educational access, improving educational quality, digital transformation, educational governance reform, and inclusive education. The bibliometric analysis indicates that the themes of education, access, quality, equity, and policy constitute the main conceptual structure of the literature. The thematic map identifies education and access as motor themes, while reforms and policy function as basic themes. Themes related to educational systems, the public sector, and inclusivity remain classified as emerging themes. The findings suggest that the development of Social Studies Education requires the integration of educational policy, curriculum development, and educational resources to foster social literacy and critical thinking skills. This study concludes that achieving equitable access to and quality of education requires an integrated approach involving expanded access, enhanced learning quality, policy reform, digital transformation, and strengthened principles of inclusivity to promote an equitable, high-quality, and sustainable education system.

Keywords:

educational access; educational equity; educational policy; educational quality; social science education



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan manusia. Pendidikan juga menjadi fondasi bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar setiap individu, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan mobilitas sosial, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Pakkan et al., 2023). Komitmen internasional terhadap pentingnya pendidikan tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*), khususnya SDG 4 yang menargetkan terwujudnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (L. Shi et al., 2019). SDG 4 menegaskan bahwa akses pendidikan dan mutu pendidikan merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan keadilan pendidikan. UNESCO menekankan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan harus disertai dengan peningkatan kualitas pembelajaran agar manfaat pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat (Bergman et al., 2018; Luo et al., 2022; Wiktor-Mach, 2020).

Berbagai negara telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan selama dua dekade terakhir, namun ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi tantangan global yang signifikan. Laporan pemantauan pendidikan global menunjukkan bahwa jutaan anak dan remaja di berbagai belahan dunia masih menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak (UNESCO, 2026). Kelompok yang paling rentan berasal dari keluarga miskin, daerah terpencil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Di

banyak negara, peningkatan akses pendidikan juga belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan hasil belajar yang setara, sehingga memunculkan fenomena learning inequality atau ketimpangan hasil belajar antar kelompok sosial dan wilayah (Antoninis et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan memperluas akses pendidikan tidak secara otomatis menjamin tercapainya mutu pendidikan yang merata.

Perkembangan penelitian dalam bidang kebijakan pendidikan menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap isu pemerataan pendidikan. Sejumlah penelitian mengkaji kebijakan perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan (Y. Shi et al., 2022; Wanti et al., 2022), sementara penelitian lainnya berfokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, atau pemanfaatan teknologi pendidikan (Antoninis et al., 2020; Cheah et al., 2023). Penelitian mengenai pendidikan inklusif, transformasi digital, dan implementasi SDG 4 juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir (Dastyari & Jose, 2024; Mintz et al., 2024; Nuankaew et al., 2025; Pagliara et al., 2024; Yang et al., 2025). Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih dilakukan secara terpisah dengan fokus pada aspek tertentu dari pemerataan pendidikan. Akibatnya, pemahaman mengenai bagaimana berbagai strategi kebijakan pendidikan saling berinteraksi dalam mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan masih relatif terfragmentasi.

Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial (Social Science Education), isu pemerataan akses dan mutu pendidikan memiliki posisi yang sangat penting. Pemerataan akses dan mutu pendidikan berkaitan langsung dengan upaya membangun literasi sosial, kesadaran kewarganegaraan, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman terhadap keberagaman sosial dan budaya (Steyn & Vanyoro, 2024). Pendidikan Ilmu Sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan pada tingkat makro, tetapi juga oleh bagaimana kurikulum dirancang dan bagaimana sumber daya pendidikan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran (Mustakim et al., 2024; Shaw, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai pemerataan akses dan mutu pendidikan perlu dipahami tidak hanya dari perspektif kebijakan pendidikan semata, tetapi juga dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum dan penyediaan sumber daya pendidikan (educational resources) yang mendukung terciptanya pembelajaran ilmu sosial yang inklusif, relevan, dan berkualitas.

Kajian mengenai akses pendidikan, mutu pendidikan, reformasi pendidikan, dan pendidikan inklusif telah berkembang secara signifikan. Namun, penelitian yang memetakan secara komprehensif berbagai strategi kebijakan pendidikan untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan masih terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada negara, program, atau isu tertentu sehingga menghasilkan temuan yang terpisah-pisah. Kondisi ini menunjukkan perlunya sintesis yang dapat mengidentifikasi pola kebijakan yang dominan, tren perkembangan penelitian, serta kesenjangan pengetahuan yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan strategi kebijakan pendidikan yang digunakan dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta menganalisis implikasinya terhadap pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan strategi kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Selain memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian politik dan kebijakan

pendidikan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pendidikan yang lebih terintegrasi untuk mendukung pencapaian SDG 4.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Scoping Review untuk memetakan perkembangan penelitian mengenai strategi kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Scoping review dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mensintesis secara sistematis berbagai bukti ilmiah yang tersedia pada suatu bidang penelitian yang luas dan kompleks. Berbeda dengan systematic review yang berfokus pada evaluasi efektivitas intervensi tertentu, scoping review bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik penelitian, tema-tema utama, tren perkembangan kajian, serta kesenjangan penelitian yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kerangka kerja yang dikembangkan oleh Arksey & O’Malley (2005) yang terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) merumuskan pertanyaan penelitian, (2) mengidentifikasi studi yang relevan, (3) menyeleksi studi, (4) melakukan ekstraksi dan pemetaan data (charting the data), serta (5) mengumpulkan, merangkum, dan melaporkan hasil penelitian. Pelaporan hasil review mengikuti pedoman PRISMA *Extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR) untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan proses penelitian (Tricco et al., 2018).

Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada bulan Mei 2026 menggunakan basis data Scopus karena merupakan salah satu basis data ilmiah terbesar yang mencakup publikasi internasional bereputasi dan banyak digunakan dalam penelitian review. Strategi pencarian disusun dengan mengombinasikan kata kunci "educational policy OR education policy OR education reform AND educational equity OR equity in education OR equitable access AND QUALITY education OR education QUALITY OR educational access OR equitable education. Pencarian awal menghasilkan 79 dokumen yang berpotensi relevan dengan topik penelitian.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi dan eksklusi artikel dapat dilihat pada tabel berikut:

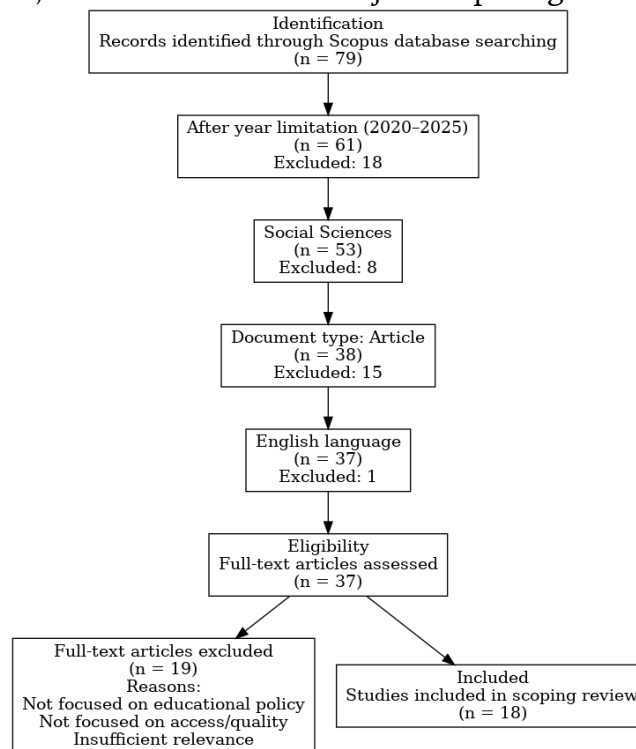
Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Tahun Publikasi	2020–2025	Sebelum 2020
Basis Data	Terindeks Scopus	Tidak terindeks Scopus
Bidang Ilmu	Social Sciences	Selain Social Sciences
Jenis Dokumen	Article	Review article, conference paper, editorial, book chapter, note, letter
Bahasa	Bahasa Inggris	Selain bahasa Inggris
Fokus Kajian	Kebijakan pendidikan, reformasi pendidikan, pemerataan akses pendidikan,	Tidak relevan dengan fokus penelitian

	mutu pendidikan, pendidikan inklusif	
Ketersediaan Dokumen	Full-text tersedia	Full-text tidak tersedia
Relevansi	Menjawab pertanyaan penelitian	Tidak mendukung tujuan penelitian
Substansi		

Proses Seleksi Artikel

Seleksi artikel dilakukan secara bertahap sesuai dengan pedoman PRISMA-ScR. Diagram PRISMA-ScR yang menggambarkan proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi artikel ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Diagram PRISMA-ScR

Pada tahap identifikasi diperoleh 79 dokumen dari hasil pencarian Scopus. Selanjutnya dilakukan pembatasan berdasarkan tahun publikasi (2020–2025) sehingga tersisa 61 dokumen. Penyaringan berdasarkan bidang ilmu Social Sciences menghasilkan 53 dokumen. Setelah dilakukan pembatasan jenis dokumen berupa artikel penelitian (article), jumlah dokumen berkurang menjadi 38 artikel. Selanjutnya penyaringan berdasarkan bahasa Inggris menghasilkan 37 artikel. Pada tahap eligibility, seluruh artikel ditelaah berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Sebanyak 19 artikel dieliminasi karena tidak secara langsung membahas strategi kebijakan pendidikan, tidak berfokus pada pemerataan akses atau mutu pendidikan, atau memiliki relevansi yang terbatas terhadap tujuan penelitian. Dengan demikian, diperoleh 18 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam analisis akhir.

Ekstraksi dan Pemetaan Data (Data Charting)

Data dari setiap artikel yang memenuhi kriteria seleksi diekstraksi secara sistematis menggunakan lembar ekstraksi data yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang dikumpulkan mencakup identitas artikel, konteks penelitian, tujuan, metode, fokus kebijakan pendidikan, temuan utama, serta implikasi kebijakan. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun dalam matriks ekstraksi untuk memudahkan proses analisis, sintesis, dan identifikasi pola temuan antarpencapaian.

Analisis Bibliometrik

Untuk memperkuat pemetaan literatur, penelitian ini menggabungkan scoping review dengan analisis bibliometrik. Data bibliografis yang diperoleh dari Scopus diekspor dalam format CSV dan dianalisis menggunakan R-Studio melalui Biblioshiny. Analisis bibliometrik dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu Analisis Co-occurrence Network untuk memetakan hubungan antar kata kunci yang muncul dalam artikel yang direview. Teknik ini memungkinkan identifikasi tema-tema utama dan keterhubungan konseptual antar topik penelitian berdasarkan frekuensi kemunculan bersama (co-occurrence). Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk jaringan (network visualization) yang menunjukkan kluster tema penelitian serta kekuatan hubungan antar konsep. Selanjutnya adalah Analisis Thematic Map untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan dan posisi strategis suatu tema dalam literatur berdasarkan dua dimensi, yaitu centrality dan density. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tema yang mendominasi penelitian, tema yang telah matang, serta tema-tema baru yang berpotensi menjadi arah penelitian masa depan.

Sintesis Data

Data yang telah diekstraksi dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik (thematic synthesis). Artikel-artikel yang direview dikelompokkan berdasarkan kesamaan fokus, strategi kebijakan, dan temuan penelitian. Hasil sintesis kemudian diintegrasikan dengan hasil analisis bibliometrik untuk menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai strategi kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Melalui kombinasi scoping review dan analisis bibliometrik, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tema-tema utama yang berkembang dalam literatur, tetapi juga menjelaskan hubungan konseptual antar tema, tren perkembangan penelitian, serta kesenjangan penelitian yang masih memerlukan perhatian pada masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

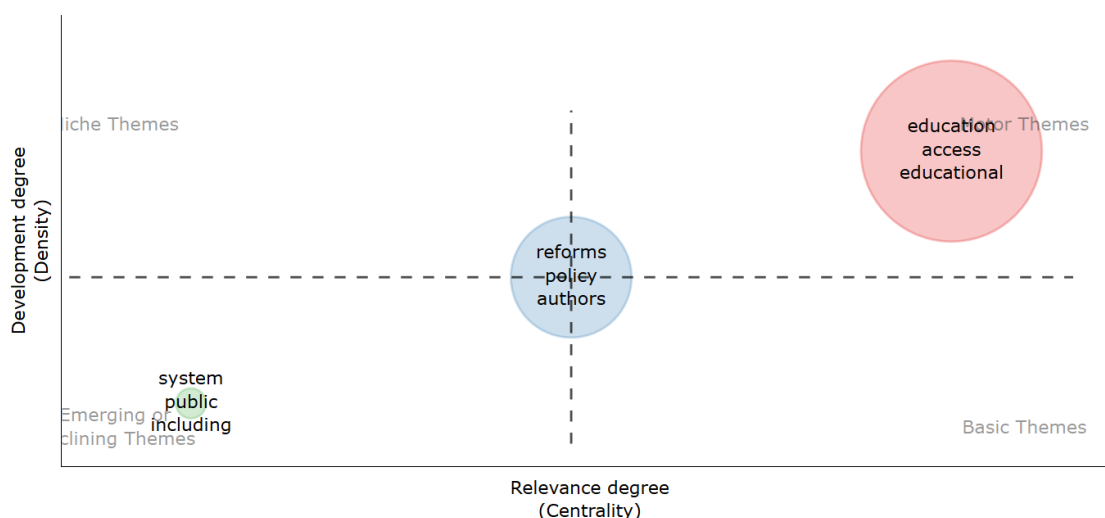
Proses identifikasi dan seleksi artikel menggunakan pedoman PRISMA-ScR menghasilkan 18 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Artikel-artikel tersebut diterbitkan antara tahun 2021–2025 dan berasal dari berbagai konteks pendidikan, termasuk Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Fokus penelitian yang direview mencakup kebijakan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pendidikan inklusif, transformasi digital, reformasi tata kelola pendidikan, serta implementasi *Sustainable Development Goal* 4 (SDG 4). Untuk memperoleh gambaran konseptual yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penelitian, analisis bibliometrik dilakukan melalui visualisasi *co-occurrence network* dan *thematic map*.

Klaster keempat (biru) meliputi kata kunci support, disparities, inclusive, engagement, dan institutions. Klaster ini merefleksikan perhatian literatur terhadap pentingnya dukungan kelembagaan, partisipasi berbagai pemangku kepentingan, serta upaya mengurangi kesenjangan yang masih terjadi dalam sistem pendidikan. Aspek inklusivitas menjadi tema sentral yang menegaskan perlunya keterlibatan institusi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih setara.

Hasil analisis jaringan ko-kemunculan menunjukkan bahwa literatur tidak hanya berfokus pada isu akses dan kualitas pendidikan, tetapi juga mengaitkannya dengan reformasi pendidikan, implementasi kebijakan, inklusi sosial, dukungan institusional, serta pembangunan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan dipahami sebagai sistem multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan, kelembagaan, dan konteks sosial yang lebih luas.

Thematic Map Analysis

Thematic map digunakan untuk mengidentifikasi posisi, tingkat perkembangan, dan peran suatu tema dalam suatu bidang penelitian. Visualisasi *Thematic map* berdasarkan kajian literatur dapat terlihat pada gambar 2.



Gambar 3. Visualisasi Thematic Map

Sumber: Data Penelitian, 2026

Analisis ini bekerja dengan memetakan tema berdasarkan dua indikator utama, yaitu centrality dan density. Centrality menunjukkan tingkat keterhubungan suatu tema dengan tema-tema lain dalam jaringan penelitian yang mencerminkan tingkat kepentingan atau pengaruh tema tersebut dalam bidang kajian. Sementara itu, density menunjukkan tingkat kematangan dan pengembangan internal suatu tema, yang menggambarkan seberapa kuat hubungan antar kata kunci di dalam tema tersebut. Tema-tema penelitian dikelompokkan ke dalam empat kuadran. Motor themes memiliki nilai centrality dan density yang tinggi sehingga berperan sebagai tema utama yang sudah berkembang dengan baik dan menjadi penggerak bidang penelitian. Basic themes memiliki centrality tinggi tetapi density rendah, yang berarti tema tersebut sangat penting dan banyak terkait dengan tema lain, namun masih

memerlukan pengembangan konseptual lebih lanjut. Niche themes memiliki density tinggi tetapi centrality rendah, menunjukkan tema yang berkembang secara mendalam namun bersifat spesifik dan kurang terhubung dengan tema utama. Adapun emerging or declining themes memiliki nilai centrality dan density yang rendah, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai tema yang masih baru berkembang atau mulai kehilangan relevansinya dalam literatur. Berdasarkan hasil analisis thematic map, teridentifikasi tiga kelompok tema utama yang menggambarkan struktur dan perkembangan penelitian dalam bidang yang dikaji. Tema-tema tersebut dipetakan berdasarkan tingkat centrality dan density, sehingga dapat menunjukkan posisi strategis masing-masing tema dalam jaringan literatur.

Pada kuadran Motor Themes, terdapat kata kunci education, access, dan educational. Tema-tema ini memiliki nilai centrality dan density yang tinggi, yang menunjukkan bahwa tema tersebut tidak hanya menjadi pusat keterhubungan dalam literatur, tetapi juga telah berkembang secara konseptual dengan baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa isu pendidikan dan akses pendidikan merupakan fokus utama penelitian sekaligus menjadi penggerak perkembangan kajian dalam bidang pemerataan pendidikan.

Selanjutnya, pada kuadran Basic Themes ditemukan kata kunci reforms, policy, dan authors. Tema-tema ini memiliki keterhubungan yang kuat dengan keseluruhan bidang penelitian, namun tingkat pengembangannya masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dan kebijakan pendidikan berfungsi sebagai fondasi konseptual yang mendukung diskusi mengenai pemerataan pendidikan, meskipun belum berkembang seintensif tema pendidikan dan akses pendidikan.

Sementara itu, kuadran Emerging Themes mencakup kata kunci system, public, dan including. Tema-tema ini memiliki nilai centrality dan density yang relatif rendah, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai area kajian yang masih berada pada tahap awal perkembangan. Keberadaan tema-tema tersebut menunjukkan adanya peluang bagi penelitian di masa depan untuk mengeksplorasi lebih lanjut aspek sistem pendidikan, peran sektor publik, dan pendekatan inklusif dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Analisis tidak menunjukkan keberadaan Niche Themes yang kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bidang penelitian masih terkonsentrasi pada isu-isu utama yang berkaitan dengan pendidikan, akses, dan kebijakan pendidikan, serta belum mengalami fragmentasi yang signifikan ke dalam subbidang kajian yang sangat spesifik. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa struktur literatur yang terbentuk masih relatif terpusat pada tema-tema inti pemerataan pendidikan dengan arah perkembangan yang cenderung terintegrasi.

Sintesis Tematik Literatur

Sebagai langkah awal dalam proses sintesis tematik, seluruh artikel yang telah lolos tahap seleksi dianalisis melalui proses ekstraksi data secara sistematis. Ekstraksi data dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting dari setiap artikel, seperti penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, desain atau metode penelitian, serta temuan utama yang relevan dengan fokus kajian. Hasil ekstraksi tersebut disajikan dalam bentuk matriks data untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai karakteristik literatur penelitian yang dianalisis. Selain berfungsi sebagai ringkasan setiap studi, matriks ini juga menjadi dasar dalam proses identifikasi pola,

pengelompokan tema, dan penyusunan sintesis tematik yang dibahas pada bagian selanjutnya.

Tabel 2. Matriks Ekstraksi Data Artikel

No	Penulis (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan Utama	Implikasi Kebijakan
1	Raj (2025)	Menganalisis kontribusi National Education Policy (NEP) 2020 terhadap pendidikan tinggi inklusif di India.	Analisis kebijakan dan dokumen	NEP 2020 menekankan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif, fleksibilitas pembelajaran, dan kesetaraan pendidikan.	Reformasi pendidikan harus mengintegrasikan akses, inklusi, dan kualitas secara simultan.
2	Nedungadi, Tang, & Raman (2024)	Mengkaji potensi Generative AI dalam mendukung pencapaian SDG 4.	Analisis bibliometrik dan cocitation network (1501 publikasi)	AI berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran, personalisasi belajar, dan akses pendidikan.	Diperlukan regulasi dan kebijakan etis dalam implementasi AI di pendidikan.
3	Worku & Tamiru (2025)	Mengevaluasi kontribusi Sector-Wide Approach (SWA) terhadap pembangunan pendidikan berkelanjutan di Ethiopia.	Analisis dokumen kebijakan	SWA berhasil meningkatkan angka partisipasi dan kesetaraan gender, namun masih menghadapi masalah kualitas pembelajaran.	Kebijakan pendidikan perlu menyeimbangkan perluasan akses dengan peningkatan mutu.
4	Chanimbe & Ayi-Bonte (2025)	Menganalisis strategi kepala sekolah dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan Free SHS di Ghana.	Studi kasus kualitatif	Kepala sekolah memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan gratis.	Keberhasilan reformasi membutuhkan dukungan implementasi di tingkat sekolah.
5	Chaka (2025)	Mengkaji tantangan dan peluang pembelajaran	Analisis kualitatif dan dokumen	Ketimpangan digital dan keterbatasan sumber daya	Investasi pada teknologi dan dukungan mahasiswa

		berpusat pada mahasiswa di pendidikan tinggi Afrika Selatan.		menghambat pendidikan inklusif.	diperlukan untuk meningkatkan akses dan mutu.
6	Garcia et al. (2024)	Menelaah implementasi kebijakan No Child Left Behind dalam konteks literasi di Filipina.	Analisis kebijakan	Kebijakan meningkatkan akses pendidikan, namun tantangan literasi dan kesenjangan sosial ekonomi masih muncul.	Program literasi berbasis komunitas perlu diperkuat.
7	Anderson et al. (2025)	Mengevaluasi kemajuan Australia dalam mencapai SDG 4 bagi siswa penyandang disabilitas.	Analisis kebijakan pendidikan	Hambatan sistemik dan kurangnya koordinasi nasional menghambat pendidikan inklusif.	Diperlukan strategi nasional yang lebih terintegrasi untuk pendidikan inklusif.
8	Njeuma (2025)	Mengkaji hubungan antara perluasan akses dan mutu pendidikan tinggi di Kamerun.	Mixed methods	Ekspansi pendidikan tinggi berhasil meningkatkan akses, tetapi menimbulkan tekanan terhadap mutu pendidikan.	Perlu kebijakan yang menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas.
9	Alhassan et al. (2025)	Meninjau penggunaan Robotic Process Automation (RPA) dalam pendidikan.	Systematic Literature Review	RPA meningkatkan efisiensi administrasi dan mendukung pembelajaran yang lebih personal.	Kebijakan digitalisasi pendidikan perlu memasukkan otomatisasi proses pembelajaran.
10	Aitbayeva et al. (2025)	Menganalisis persepsi mahasiswa terhadap buku teks terjemahan di Kazakhstan.	Studi kasus	Buku teks terjemahan meningkatkan akses terhadap pengetahuan global dalam bahasa lokal.	Kebijakan lokalisasi sumber belajar dapat memperluas akses pendidikan berkualitas.

11	Gupta & Kumar (2024)	Mengkaji implementasi NEP 2020 dalam pendidikan tinggi India.	Analisis kebijakan dan manajemen perubahan	Reformasi pendidikan memerlukan perubahan kelembagaan yang terencana dan berkelanjutan.	Tata kelola pendidikan menjadi faktor penting keberhasilan reformasi.
12	Garcia et al. (2023)	Mengkaji persepsi siswa terhadap kebijakan perpanjangan wajib belajar di Finlandia.	Survei dan analisis persepsi	Kebijakan dipandang mampu meningkatkan kesetaraan kesempatan pendidikan.	Wajib belajar dapat menjadi instrumen pemerataan pendidikan jika didukung layanan yang memadai.
13	Kalin et al. (2021)	Menganalisis reformasi pendidikan Finlandia dari perspektif ekosistem pendidikan.	Analisis konseptual	Reformasi berhasil karena keterpaduan kurikulum, evaluasi, pendidikan guru, dan pasar kerja.	Pendekatan sistemik diperlukan untuk mencapai akses dan mutu pendidikan secara bersamaan.
14	Various Authors (2025)	Menelaah perkembangan pendidikan kedokteran di Afrika Selatan.	Literature Review	Reformasi pendidikan kedokteran berupaya mengatasi ketimpangan historis dan meningkatkan inklusivitas.	Pendidikan profesional harus mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan kualitas.
15	Bari et al. (2022)	Mengevaluasi program kemitraan pemerintah-swasta (EMO) di Pakistan.	Realist Evaluation	Kemitraan publik-swasta berkontribusi terhadap akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan.	Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat kapasitas layanan pendidikan.
16	Mokoena (2025)	Menganalisis persepsi academic entitlement mahasiswa di Afrika Selatan.	Survei deskriptif	Ketimpangan sosial ekonomi masih memengaruhi pengalaman pendidikan mahasiswa.	Kebijakan pendidikan tinggi harus memperhatikan dukungan sosial bagi kelompok rentan.
17	Muriithi et al. (2024)	Mengkaji akses, kesetaraan, dan	Kajian konseptual	Learning poverty dan	Kebijakan pendidikan perlu

		mutu pendidikan dalam konteks pascapandemi.		kesenjangan pendidikan menjadi tantangan utama.	berorientasi pada pemerataan hasil belajar.
18	Thai Researchers (2025)	Mengembangkan kerangka kebijakan digital untuk pembelajaran bahasa Inggris di Thailand.	Analisis dokumen kebijakan	Teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa jika didukung kebijakan yang terintegrasi.	Transformasi digital harus disertai pengembangan kapasitas guru dan infrastruktur.

Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil ekstraksi data yang telah disajikan pada tabel matriks ekstraksi data artikel, selanjutnya dilakukan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan isu utama yang muncul secara berulang dalam berbagai penelitian. Proses sintesis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan yang memiliki kesamaan makna ke dalam tema-tema yang lebih luas sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fokus kajian yang diteliti. Analisis tematik menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan yang dilaporkan dalam literatur dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu: (1) perluasan akses dan kesetaraan pendidikan, (2) peningkatan mutu pendidikan, (3) transformasi digital pendidikan, (4) reformasi tata kelola pendidikan, dan (5) pendidikan inklusif bagi kelompok rentan. Hasil sintesis tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Sintesis Tematik Literatur

Tema	Artikel
Perluasan akses dan kesetaraan pendidikan	1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 16, 17
Peningkatan mutu pendidikan	2, 6, 8, 13, 14, 17, 18
Transformasi digital pendidikan	2, 5, 9, 18
Tata kelola dan reformasi pendidikan	1, 3, 11, 13, 15
Pendidikan inklusif dan kelompok rentan	1, 4, 7, 14, 16

Sumber: Data Penelitian, 2026

Tema yang paling dominan dalam literatur adalah upaya memperluas akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan kesempatan belajar. Berbagai kebijakan dikembangkan untuk mengatasi hambatan ekonomi, geografis, sosial, dan budaya yang membatasi partisipasi pendidikan. Kebijakan Free Senior High School (SHS) di Ghana menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya menghilangkan hambatan biaya pendidikan pada jenjang menengah (Chanimbe & Ayi-Bonte, 2025). Temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan sumber daya. Demikian pula, National Education Policy (NEP) 2020 di India menempatkan pemerataan akses sebagai salah satu prioritas utama melalui perluasan kesempatan belajar dan penguatan inklusivitas pendidikan tinggi (Betsurmath & Chidambaram, 2024). Studi di Kamerun juga memperlihatkan bahwa

ekspansi pendidikan tinggi berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa yang dapat mengakses pendidikan (Tanyu et al., 2026). Namun, peningkatan akses yang cepat sering kali menimbulkan tekanan terhadap kapasitas institusi pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perluasan akses merupakan prasyarat penting bagi keadilan pendidikan, tetapi tidak cukup untuk menjamin kualitas pendidikan yang setara. Secara umum, literatur menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar meningkatkan angka partisipasi menuju penguatan konsep educational equity, yaitu memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau disabilitas.

Selain akses pendidikan, mutu pendidikan menjadi tema dominan kedua dalam literatur. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan memperluas akses pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Studi di Filipina mengungkap bahwa meskipun partisipasi pendidikan meningkat, tantangan literasi masih menjadi permasalahan yang signifikan (Aitbayeva et al., 2025; Gatcho et al., 2024). Temuan serupa juga terlihat dalam kajian Ethiopia yang menunjukkan bahwa reformasi pendidikan berhasil memperluas akses, tetapi hasil belajar siswa belum mengalami peningkatan yang sebanding (Worku & Tamiru, 2025). Artikel mengenai reformasi pendidikan Finlandia memberikan perspektif berbeda (Niemi, 2021). Keberhasilan Finlandia dalam mempertahankan kualitas pendidikan dikaitkan dengan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan pengembangan kurikulum, pendidikan guru, evaluasi pendidikan, dan tata kelola sekolah (Juusola, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya, tetapi juga oleh koherensi kebijakan dan kapasitas implementasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan perhatian terhadap kualitas guru, kurikulum, sumber belajar, sistem evaluasi, serta lingkungan pembelajaran yang mendukung. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang hanya berorientasi pada perluasan akses berisiko menghasilkan ketimpangan kualitas pembelajaran apabila tidak disertai strategi peningkatan mutu yang memadai.

Tema penting yang muncul dalam literatur terkini adalah transformasi digital pendidikan. Perkembangan teknologi digital dipandang sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengatasi tantangan akses dan mutu pendidikan secara simultan. Artikel mengenai Generative Artificial Intelligence (AI) menunjukkan bahwa teknologi AI berpotensi mendukung personalisasi pembelajaran, meningkatkan akses terhadap sumber belajar, dan membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih adaptif (Sa-ngiamwibool & Chooprayoon, 2025). Demikian pula, kajian mengenai Robotic Process Automation (RPA) menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan dan mendukung proses pembelajaran (Marchena Sekli & Godo, 2025). Di Thailand, pengembangan kerangka kebijakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi digital menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran apabila didukung oleh kebijakan yang terintegrasi (Nedungadi et al., 2024). Namun demikian, studi di Afrika Selatan mengingatkan bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan yang adil (David, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar dalam mendukung

pemerataan pendidikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, kompetensi guru, dan tata kelola implementasi teknologi.

Tema berikutnya yang muncul secara konsisten adalah pentingnya tata kelola pendidikan dalam menentukan keberhasilan reformasi pendidikan. Berbagai artikel menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas institusi yang mengimplementasikannya. Kajian mengenai Sector-Wide Approach (SWA) di Ethiopia menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan dapat memperkuat efektivitas pembangunan pendidikan (Worku & Tamiru, 2025) Sementara itu, implementasi NEP 2020 di India menegaskan pentingnya manajemen perubahan yang terencana dalam mendukung reformasi pendidikan. Studi mengenai kemitraan publik-swasta di Pakistan memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor nonpemerintah dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Gul & Dhani, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi keterbatasan sumber daya pendidikan. Secara garis besar, literatur yang dikaji menunjukkan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil cenderung ditandai oleh koordinasi kebijakan yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

Pendidikan inklusif menjadi tema yang semakin penting dalam literatur kebijakan pendidikan kontemporer. Berbagai artikel menyoroti perlunya kebijakan yang mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi (Odoni, 2024). Kajian mengenai siswa penyandang disabilitas di Australia menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan inklusif telah diterapkan, masih terdapat hambatan sistemik yang membatasi partisipasi penuh kelompok tersebut dalam pendidikan (Hay & Beamish, 2025). Temuan serupa juga terlihat pada berbagai studi yang menyoroti kelompok masyarakat berpendapatan rendah, daerah terpencil, dan kelompok yang kurang terwakili dalam pendidikan tinggi (Hay & Beamish, 2025). National Education Policy 2020 di India menempatkan inklusivitas sebagai salah satu prinsip utama reformasi pendidikan (Raj, 2025). Di Afrika Selatan, berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan tinggi masih menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan historis yang memengaruhi akses dan pengalaman belajar mahasiswa (Boateng et al., 2025; David, 2025; Sims et al., 2025). Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses, tetapi juga dengan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang.

Meskipun sebagian besar artikel yang direview tidak secara eksplisit membahas pendidikan ilmu sosial, berbagai tema yang muncul, seperti pemerataan akses, kualitas pendidikan, transformasi digital, tata kelola pendidikan, dan pendidikan inklusif, merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu sosial. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan mutu memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial (IPS). Pendidikan ilmu sosial pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah, tetapi juga sebagai wahana pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran

sosial, kemampuan berpikir kritis, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman (Cho, 2018; Sant et al., 2021; Steyn & Vanyoro, 2024).

Dari perspektif kebijakan, hasil sintesis menunjukkan bahwa berbagai reformasi pendidikan yang diterapkan di berbagai negara menempatkan prinsip pemerataan, inklusivitas, dan keadilan sebagai tujuan utama pembangunan pendidikan. Kebijakan seperti National Education Policy (NEP) 2020 di India, reformasi pendidikan di Finlandia, serta berbagai program perluasan akses pendidikan di negara berkembang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar peningkatan partisipasi pendidikan menuju penguatan educational equity (Antoninis et al., 2020; Dastyari & Jose, 2024; Mintz et al., 2024; Odondi, 2024; Raj, 2025). Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial, orientasi kebijakan tersebut memiliki relevansi yang tinggi karena nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, penghormatan terhadap keberagaman, dan partisipasi warga negara merupakan tujuan fundamental pembelajaran ilmu sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang mendukung akses dan partisipasi yang setara dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan pendidikan ilmu sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dari aspek kurikulum, hasil kajian memperlihatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas desain kurikulum dan proses pembelajaran. Temuan mengenai keberhasilan reformasi pendidikan Finlandia menunjukkan bahwa integrasi antara kurikulum, pengembangan profesional guru, evaluasi pendidikan, dan tata kelola sekolah menjadi faktor penting dalam menghasilkan pendidikan berkualitas (Duthilleul et al., 2018; Hautamäki et al., 2023; Saloviita, 2020). Dalam Pendidikan Ilmu Sosial, kurikulum tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan materi akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah sosial, literasi kewarganegaraan, kesadaran multikultural, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis (Cho, 2018; Lim, 2015). Oleh karena itu, pengembangan kurikulum Pendidikan Ilmu Sosial perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual dan responsif terhadap berbagai isu sosial kontemporer seperti ketimpangan sosial, keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, globalisasi, dan keberagaman budaya.

Selain kebijakan dan kurikulum, ketersediaan sumber daya pendidikan (educational resources) juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan pemerataan dan mutu Pendidikan Ilmu Sosial. Hasil sintesis menunjukkan bahwa teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), buku teks, infrastruktur pendidikan, dan kapasitas guru merupakan sumber daya utama yang mendukung proses pembelajaran (Boateng et al., 2025; Gul & Dhani, 2022; Nedungadi et al., 2024; Nuankaew et al., 2025). Namun demikian, kesenjangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kompetensi digital pendidik masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara (Betsurmth & Chidambaram, 2024; Marchena Sekli & Godo, 2025; Sa-ngiamwibool & Chooprayoon, 2025; Tanyu et al., 2026). Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial, pemanfaatan sumber daya pendidikan yang beragam sangat penting untuk membantu peserta didik memahami fenomena sosial secara lebih komprehensif melalui berbagai perspektif dan sumber informasi yang kredibel. Oleh karena itu, penguatan sumber daya pendidikan perlu mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, pengembangan kompetensi guru, serta peningkatan akses terhadap sumber belajar yang relevan dan kontekstual.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan, kurikulum, dan sumber daya pendidikan menjadi prasyarat utama dalam pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial yang berkualitas. Kebijakan yang mendukung pemerataan akses akan sulit menghasilkan dampak yang optimal tanpa didukung kurikulum yang relevan dan sumber daya yang memadai (Betsurmah & Chidambaram, 2024; Chanimbe & Ayi-Bonte, 2025). Sebaliknya, kurikulum yang inovatif dan sumber daya yang berkualitas tidak akan memberikan manfaat yang luas apabila masih terdapat hambatan akses dan ketimpangan kesempatan belajar (Duthilleul et al., 2018; Hautamäki et al., 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial memerlukan pendekatan yang sistemik dan berkelanjutan yang menghubungkan reformasi kebijakan, inovasi kurikulum, serta penguatan sumber daya pendidikan secara simultan. Secara keseluruhan, literatur yang direview menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan yang berfokus pada pemerataan akses dan mutu pendidikan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial. Penguatan kebijakan yang inklusif, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap dinamika sosial, serta penyediaan sumber daya pendidikan yang memadai merupakan elemen-elemen penting dalam membentuk peserta didik yang memiliki literasi sosial, kemampuan berpikir kritis, kesadaran kewarganegaraan, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkelanjutan.

Menuju Kerangka Kebijakan Pendidikan Terintegrasi

Temuan scoping review ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan berkembang dalam lima dimensi utama: akses, mutu, digitalisasi, tata kelola, dan inklusivitas. Meskipun berbagai kebijakan telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan, literatur menunjukkan bahwa perluasan akses sering kali tidak diikuti oleh peningkatan mutu yang sebanding (Gul & Dhani, 2022; Niemi, 2021; Odondi, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan yang memisahkan akses dan mutu pendidikan menjadi kurang relevan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Sebaliknya, kebijakan pendidikan perlu dirancang secara terintegrasi dengan mempertimbangkan hubungan antara akses, kualitas pembelajaran, transformasi digital, tata kelola, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif Pendidikan Ilmu Sosial (Social Science Education), kelima dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kebijakan pendidikan (policy), kurikulum (curriculum), dan sumber daya pendidikan (educational resources) (Evans, 1990). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan inklusivitas menyediakan landasan bagi terciptanya kesempatan belajar yang setara, sementara kurikulum berperan dalam mengembangkan literasi sosial, kemampuan berpikir kritis, dan kompetensi kewarganegaraan peserta didik (David, 2025; Ní Bhroin & King, 2020). Di sisi lain, ketersediaan sumber daya pendidikan, seperti guru yang kompeten, teknologi digital, serta sumber belajar yang berkualitas, menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan dan kurikulum (Guillén-Gámez et al., 2021; Kizilgol & Kasapoglu, 2024; Navarro et al., 2016; Varghese et al., 2019). Oleh karena itu, upaya mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penguatan ketiga aspek tersebut secara simultan.

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengusulkan bahwa pencapaian pendidikan yang berkeadilan memerlukan pendekatan kebijakan terpadu yang

menghubungkan lima dimensi tersebut secara simultan. Kerangka ini juga menegaskan bahwa pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial yang berkualitas memerlukan sinergi antara kebijakan pendidikan yang inklusif, kurikulum yang responsif terhadap dinamika sosial, serta sumber daya pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang bermakna. Dengan demikian, keberhasilan reformasi pendidikan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan dalam menyediakan pengalaman belajar yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.

Kesimpulan

Berdasarkan sintesis terhadap 18 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, ditemukan bahwa berbagai negara telah menerapkan beragam strategi kebijakan pendidikan terkait mutu dan akses pendidikan. Kebijakan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, transformasi digital pendidikan, reformasi tata kelola pendidikan, serta pendidikan inklusif bagi kelompok rentan. Strategi perluasan akses diwujudkan melalui kebijakan pendidikan gratis, wajib belajar, perluasan pendidikan tinggi, dan pengurangan hambatan ekonomi terhadap partisipasi pendidikan. Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui reformasi kurikulum, penguatan kompetensi guru, pengembangan sistem penjaminan mutu, serta peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital juga muncul sebagai strategi penting untuk mendukung perluasan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan memiliki implikasi yang penting bagi pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial, terutama dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang inklusif, demokratis, dan berorientasi pada penguatan literasi sosial serta kompetensi kewarganegaraan peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema-tema yang paling dominan dalam literatur mengenai pemerataan akses dan mutu pendidikan meliputi akses pendidikan, mutu pendidikan, kesetaraan pendidikan (*educational equity*), reformasi kebijakan pendidikan, pendidikan inklusif, serta transformasi digital. Analisis *thematic map* menunjukkan bahwa tema pendidikan dan akses pendidikan merupakan *motor themes* yang menjadi pusat perkembangan penelitian, sedangkan reformasi dan kebijakan pendidikan berperan sebagai *basic themes* yang menyediakan landasan konseptual bagi berbagai studi. Temuan ini menunjukkan bahwa isu pemerataan pendidikan masih menjadi fokus utama penelitian, namun pendekatan yang digunakan semakin berkembang menuju integrasi antara akses, mutu, dan keadilan pendidikan. Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial, integrasi tersebut menegaskan pentingnya keterhubungan antara kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan penyediaan sumber daya pendidikan sebagai fondasi untuk menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Analisis bibliometrik melalui *co-occurrence network* memperlihatkan adanya hubungan konseptual yang kuat antara *education*, *access*, *quality*, *equity*, dan *policy*. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa literatur kontemporer tidak lagi memandang akses dan mutu pendidikan sebagai dua isu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dimensi yang saling berkaitan dalam mencapai pendidikan yang berkeadilan. Selain itu, keterhubungan antara tema reformasi pendidikan, dukungan

institusional, pendidikan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sistem pendidikan dalam mengintegrasikan berbagai komponen kebijakan secara simultan.

Meskipun penelitian mengenai pemerataan akses dan mutu pendidikan terus berkembang, kajian ini menemukan beberapa kesenjangan penelitian yang masih memerlukan perhatian. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada salah satu dimensi, baik akses maupun mutu pendidikan, sehingga studi yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut masih relatif terbatas. Kedua, penelitian mengenai dampak jangka panjang reformasi kebijakan pendidikan terhadap pemerataan hasil belajar masih belum banyak dilakukan. Ketiga, tema yang berkaitan dengan sistem pendidikan, tata kelola sektor publik, dan transformasi digital berbasis kecerdasan buatan masih berada pada kategori emerging themes, yang menunjukkan bahwa bidang tersebut masih memerlukan pengembangan konseptual dan empiris yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian yang secara khusus menghubungkan dimensi kebijakan (policy), kurikulum (curriculum), dan sumber daya pendidikan (educational resources) dalam kerangka Pendidikan Ilmu Sosial masih relatif terbatas dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang perlu mengembangkan model kebijakan pendidikan yang lebih integratif dengan mempertimbangkan hubungan antara akses, mutu, teknologi, tata kelola, dan inklusivitas secara bersamaan, serta mengeksplorasi bagaimana integrasi kebijakan, kurikulum, dan sumber daya pendidikan dapat mendukung pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Referensi

- Aitbayeva, A., Kuranbek, A., & Muminov, N. (2025). Students' Perceptions of Translated Textbooks in Higher Education: A Case Study from the "100 New Kazakh Textbooks" Initiative. *Perspectives of Science and Education*, 78(6), 221–240. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.14>.
- Antoninis, M., April, D., Barakat, B., Bella, N., D'Addio, A. C., Eck, M., Endrizzi, F., Joshi, P., Kubacka, K., McWilliam, A., Murakami, Y., Smith, W., Stipanovic, L., Vidarte, R., & Zekrya, L. (2020). All means all: An introduction to the 2020 Global Education Monitoring Report on inclusion. *PROSPECTS*, 49(3–4), 103–109. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09505-x>.
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>.
- Bergman, Z., Bergman, M. M., Fernandes, K., Grossrieder, D., & Schneider, L. (2018). The Contribution of UNESCO Chairs toward Achieving the UN Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 10(12), 4471. <https://doi.org/10.3390/su10124471>.
- Betsurmath, C. G., & Chidambaram, S. B. (2024). National Education Policy 2020, India: A planned change management requisite for higher education institutions. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(9), 3020. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i9.3020>.

- Boateng, A., Mensah, F. J., Boateng, S., Pillay, P., Chibisa, A., & Mahaye, N. (2025). Developmental Path to Generalized Entitlement in a South African Higher Education Institution. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(3), 191–215. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.3.10>.
- Chanimbe, T., & Ayi-Bonte, A. N. A. (2025). School leaders' coping mechanisms to confront reform implementation challenges: Evidence from Ghana's 'Free SHS' policy. *Review of Education*, 13(1), e70041. <https://doi.org/10.1002/rev3.70041>.
- Cheah, Y. H., Oliveri, A. R., & Hughes, J. E. (2023). Unpacking K-12 teachers' technology-supported, equitable practices: A mixed-methods systematic review. *Teaching and Teacher Education*, 125, 103984. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103984>.
- Cho, H. (2018). Crafting a third space: Integrative strategies for implementing critical citizenship education in a standards-based classroom. *The Journal of Social Studies Research*, 42(3), 273–285. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2017.07.001>.
- Dastyari, A., & Jose, C. (2024). Achieving inclusive and equitable quality education for all: The importance of digital inclusion. *Alternative Law Journal*, 49(4), 282–287. <https://doi.org/10.1177/1037969X241295798>.
- David, J. O. (2025). Balancing Growth, Inclusivity, and Technology: Rethinking Student-Centered Learning in South African Higher Education. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(4), 127–153. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.4.7>.
- Duthilleul, Y., Blyth, A., Imms, W., & Maslauskaitė, K. (2018). *School Design and Learning Environments in the City of Espoo, Finland*. Thematic Reviews Series. Council of Europe Development Bank, Paris. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23637.47842>.
- Evans, R. W. (1990). Teacher Conceptions of History Revisited: Ideology, Curriculum, and Student Belief. *Theory and Research in Social Education*, 18(2), 101–138. <https://doi.org/10.1080/00933104.1990.10505608>.
- Gatcho, A. R. G., Manuel, J. P. G., & Hajan, B. H. (2024). No child left behind, literacy challenges ahead: a focus on the Philippines. *Frontiers in Education*, 9, 1349307. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1349307>.
- Guillén-Gámez, F. D., Mayorga-Fernández, M. J., Bravo-Agapito, J., & Escribano-Ortiz, D. (2021). Analysis of Teachers' Pedagogical Digital Competence: Identification of Factors Predicting Their Acquisition. *Technology, Knowledge and Learning*, 26(3), 481–498. <https://doi.org/10.1007/s10758-019-09432-7>.
- Gul, M. R., & Dhani, B. S. (2022). Public-Private Partnerships in Education: Evaluating the Education Management Organisations Programme in Sindh, Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 61(2), 185–212. <https://doi.org/10.30541/v61i2pp.185-212>.
- Hautamäki, J., Ahtiainen, R., Gustavson, N., Hotulainen, R., Kupiainen, S., Tamm, M., Thuneberg, H., & Vainikainen, M. P. (2023). Finland: Improving Pupils' Opportunities for Experiencing the Joy of Learning, for Deep Learning, and for Good Learning Achievement. In Dobryakova, M., Froumin, I., Barannikov, K.,

- Moss, G., Remorenko, I., Hautamäki, J. (Eds.) *Key Competences and New Literacies*. UNIPA Springer Series. Springer, Cham..
https://doi.org/10.1007/978-3-031-23281-7_8.
- Hay, S., & Beamish, W. (2025). Australia's progress toward SDG4 targets for school-age students with disability. *Frontiers in Education*, 10, 1518917.
<https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1518917>.
- Juusola, H. (2023). What do young people think about the extension of compulsory education? *Educational Research*, 65(4), 478–495.
<https://doi.org/10.1080/00131881.2023.2263885>.
- Kizilgol, T. Z., & Kasapoglu, K. (2024). Social studies teacher competencies in 2050: an e-Delphi study. *European Journal of Futures Research*, 12(1), 4.
<https://doi.org/10.1186/s40309-024-00227-3>.
- Lim, L. (2015). Critical thinking, social education and the curriculum: foregrounding a social and relational epistemology. *The Curriculum Journal*, 26(1), 4–23.
<https://doi.org/10.1080/09585176.2014.975733>.
- Luo, L., Wang, X., & Guo, H. (2022). Contribution of UNESCO designated sites to the achievement of Sustainable Development Goals. *The Innovation*, 3(3), 100227. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2022.100227>.
- Marchena Sekli, G., & Godo, A. (2025). Transforming Teaching and Learning with Robotic Process Automation: A Systematic Review of Pedagogical Applications. *Journal of Information Technology Education: Research*, 24, 39.
<https://doi.org/10.28945/5655>.
- Mintz, J., Connolly, C., O'Brien, E., Daniela, L., & Ceallaigh, T. J. Ó. (2024). Inclusive Digital Education: Contexts, Practices and Perspectives. *Computers in the Schools*, 41(2), 115–119. <https://doi.org/10.1080/07380569.2024.2340873>.
- Mustakim, M., Ajwar, M., Kertih, I. W., & Lasmawan, I. W. (2024). The Use of Technology in Curriculum Development and Social Studies Learning Design in Elementary Schools: A Critical Analysis and Literature Review. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 10(3), 489–504.
<https://doi.org/10.29408/jhm.v10i3.26986>.
- Navarro, S. B., Zervas, P., Gesa, R. F., & Sampson, D. G. (2016). Developing Teachers' Competences for Designing Inclusive Learning Experiences. *Journal of Educational Technology & Society*, 19(1), 17–27.
<http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.19.1.17>.
- Nedungadi, P., Tang, K.-Y., & Raman, R. (2024). The Transformative Power of Generative Artificial Intelligence for Achieving the Sustainable Development Goal of Quality Education. *Sustainability*, 16(22), 9779.
<https://doi.org/10.3390/su16229779>.
- Ní Bhroin, Ó., & King, F. (2020). Teacher education for inclusive education: a framework for developing collaboration for the inclusion of students with support plans. *European Journal of Teacher Education*, 43(1), 38–63.
<https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1691993>.

- Niemi, H. (2021). Education Reforms for Equity and Quality: An Analysis from an Educational Ecosystem Perspective with Reference to Finnish Educational Transformations. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 11(2), 13–35. <https://doi.org/10.26529/cepsj.1100>.
- Nuankaew, P., Nasa-Ngium, P., & Nuankaew, W. S. (2025). Artificial intelligence and educational data mining technologies for the 4th SDG quality education: A systematic review. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 4217–4235. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.7468>.
- Odondi, W. (2024). Empowering equality: Advancing quality education in the contemporary global landscape. *Future in Educational Research*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.1002/fer3.26>.
- Pagliara, S. M., Bonavolontà, G., Pia, M., Falchi, S., Zurru, A. L., Fenu, G., & Mura, A. (2024). The Integration of Artificial Intelligence in Inclusive Education: A Scoping Review. *Information*, 15(12), 774. <https://doi.org/10.3390/info15120774>.
- Pakkan, S., Sudhakar, C., Tripathi, S., & Rao, M. (2023). A correlation study of sustainable development goal (SDG) interactions. *Quality & Quantity*, 57(2), 1937–1956. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01443-4>.
- Raj, S. B. (2025). Pathways to inclusive higher education: learnings from India's National Education Policy 2020. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 11(1), 82–92. <https://doi.org/10.1080/20020317.2024.2382376>.
- Saloviita, T. (2020). Attitudes of Teachers Towards Inclusive Education in Finland. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 64(2), 270–282. <https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1541819>.
- Sa-ngiamwibool, A., & Chooprayoon, D. (2025). An Evidence-Based Policy Framework for Enhancing English Language Learning through Digital Technologies in Thai Higher Education. *Forum for Linguistic Studies*, 7(6). <https://doi.org/10.30564/fls.v7i6.9616>.
- Sant, E., McDonnell, J., Pashby, K., & Menendez Alvarez-Hevia, D. (2021). Pedagogies of agonistic democracy and citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 16(3), 227–244. <https://doi.org/10.1177/1746197920962373>.
- Shaw, M. (2023). Worldview literacy as intercultural citizenship education: A framework for critical, reflexive engagement in plural democracy. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(2), 197–213. <https://doi.org/10.1177/17461979211062125>.
- Shi, L., Han, L., Yang, F., & Gao, L. (2019). The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects. *Sustainability*, 11(24), 7158. <https://doi.org/10.3390/su11247158>.
- Shi, Y., Pyne, K., Kulophas, D., & Bangpan, M. (2022). Exploring equity in educational policies and interventions in primary and secondary education in the context of public health emergencies: A systematic literature review.

- International Journal of Educational Research*, 111, 101911.
<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101911>.
- Sims, D., Zingela, Z., Mokhachane, M., Botha, G., Mawela, D., Singaram, V., Baatjes, K., Green-Thompson, L., & Begg, K. (2025). Medical education, reflections and perspectives from South Africa: a review. *BMC Medical Education*, 25(1), 370. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-06910-8>.
- Steyn, M., & Vanyoro, K. P. (2024). Critical Diversity Literacy: A framework for multicultural citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19(3), 493–509. <https://doi.org/10.1177/17461979231178520>.
- Tanyu, N. R., Rofiah, K., Ashu, F. E., & Jude, C. G. (2026). Dual Challenge: Expanding Equal Access and Ensuring Quality in Cameroon's Higher Education. *International Journal of African Higher Education*, 12(2), 1–26. <https://doi.org/10.6017/ijahe.v12i2.21587>.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>.
- UNESCO. (2026). *Global Education Monitoring Report 2026: Access and Equity*. <https://www.unesco.org/reports/gem-report/en/2026-access-equity>. Diakses tanggal 12 Mei 2026.
- Varghese, C., Vernon-Feagans, L., & Bratsch-Hines, M. (2019). Associations between teacher–child relationships, children's literacy achievement, and social competencies for struggling and non-struggling readers in early elementary school. *Early Childhood Research Quarterly*, 47, 124–133. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.09.005>.
- Wanti, M., Wesselink, R., Biemans, H., & Brok, P. den. (2022). Determining factors of access and equity in higher education: A systematic review. *Equity in Education & Society*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.1177/27526461221092429>.
- Wiktor-Mach, D. (2020). What role for culture in the age of sustainable development? UNESCO's advocacy in the 2030 Agenda negotiations. *International Journal of Cultural Policy*, 26(3), 312–327. <https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1534841>.
- Worku, M. Y., & Tamiru, A. B. (2025). Contributions and limitations of sector wide approaches toward sustainable educational development. *Discover Sustainability*, 6(1), 1349. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02227-0>.
- Yang, C., Wang, T., & Xiu, Q. (2025). Towards a Sustainable Future in Education: A Systematic Review and Framework for Inclusive Education. *Sustainability*, 17(9), 3837. <https://doi.org/10.3390/su17093837>.